

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki sistem pemerintahannya masing-masing. Sistem pemerintahan itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah yang dialami bangsa tersebut. Konteks dan peristiwa yang dialami dalam moment kesejarahan memberikan pengaruh pada pilihan atas sistem pemerintahan negara bersangkutan. Di antara beragam sistem pemerintahan di dunia, demokrasi selalu muncul sebagai suatu isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia, utamanya sejak zaman yang sering disebut sebagai Yunani kuno. Hal ini, terjadi karena secara faktual demokrasi telah menjadi semacam sprit bagi individu atau sekelompok individu yang bernaung dibawah institusi negara untuk terlibat dalam konstelasi politik dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama demi terwujudnya tata sosial yang adil, egaliter dan manusiawi. Demokrasi merupakan salah satu isu dan wacana yang mampu mengintegrasikan cita-cita ideal manusia sejagad, karena wacana demokrasi mampu melintasi sekaligus melampaui batas-batas geografis, suku bangsa, agama dan kebudayaan.¹

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Diskursus seputar sistem negara bernama demokrasi seakan tiada habisnya. Terbukti, pada abad XXI yang dikenal dengan abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, demokrasi

¹ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal. 11.

masih menjadi pilihan utama berbagai negara dibelahan dunia. Bahkan bisa dikatakan, demokrasi menjadi virus yang mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya sistem terbaik yang pernah ada, karena demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan negara di mana rakyat secara proporsional menentukan secara langsung kekuasaan pada negara itu.² Akan tetapi yang hakiki dari demokrasi ialah kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berserikat. Sebagaimana dianalisis oleh filosof Jurgen Habermas, yang hakiki dari suatu demokrasi adalah kelas politik yaitu para pemimpin, para wakil rakyat, “dikepung” oleh “arena publik” yang terus menerus mendiskusikan segala macam kebijakan pemerintah lewat kontrol langsung rakyat.³ Esensi dari demokrasi ini mau menunjukkan keterbukaan untuk mengapai suatu kekekayaan dalam kebersamaan. Semua warga sama-sama terlibat dalam memutuskan kebijakan publik, dalam menegakkan hukum, dalam mengambil keputusan, dalam menetapkan peraturan, dan dalam menyelesaikan semua persoalan publik. Demokrasi tetap di pandang sebagai akses yang lebih layak dalam mencapai nilai-nilai seperti kesetaraan, keragaman, penghormatan atas hak-hak asasi, dan tanggung jawab bersama.⁴

Singkatnya, demokrasi menuntut cara hidup warga negara yang berkomitmen pada kesejahteraan umum dan keterlibatan aktif dalam hal ihwal publik. Di dalam demokrasi, urusan publik meminta perhatian dan upaya tertentu dari setiap warga negara yang memiliki kemampuan politik⁵ untuk berpartisipasi dalam mengatur hidup bersama. Dasar dan hakikat dari

² Arcy Deo Datus, *Filsafat Politik*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2013, hal. 305.

³ Frans Magnis Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara 2015, hal. 71.

⁴ Felix Baghi, *Kewarganegaraan Demokratis; Dalam Sorotan Filsafat Politik*, Maumere; Penerbit Ledalero 2009, hal.8.

⁵ Politik dalam bahasa Inggris berarti *politics*, dan dalam bahasa Yunani *politicos*; menyangkut warga Negara. Dan secara khusus lebih berhubungan dengan pemerintahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia politik diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan. Aristoteles dalam risalatnya yang berjudul *politeia* menyatakan bahwa politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Manusia – manusia adalah makhluk “polis” (Negara kota). Kecenderungan alamiah manusia adalah membentuk kelompok, bertindak dalam kelompok, dan

perhatian dan upaya ini adalah adanya kemauan bersama untuk menata diri secara politis demi perwujudan nilai-nilai itu. Sehingga hak demokrasi seorang warga negara adalah hak keterlibatan dalam proses menentukan kebijakan bersama. Sejauh demokrasi berguna dalam menilai sebuah prosedural kebijakan bersama, maka hak demokrasi seorang warga Negara adalah hak berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan itu. Setiap warga negara atau kelompok manapun, turut bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan bersama. Kebijakan bersama adalah kebijakan yang diputuskan bersama untuk di jalankan berdasarkan asas keadilan.

Maka dalam kanzanah politik kontemporer, nilai-nilai seperti kesetaraan, keragaman, penghormatan atas hak – hak asasi dan tanggung jawab bersama, telah menjadi dasar substansial pembahasan tentang demokras.⁶ Kalau demokrasi, sebagaimana dimengerti sebagai suatu bentuk pemerintahan yang di pimpiin oleh *demos* (rakyat), maka bentuk pemerintahan yang dimaksud di sini, bukan saja dalam arti konstitusional, tetapi lebih pada suatu komonitas politik yang sama-sama terlibat dalam diskursus untuk memutuskan dan mengatur segala hal ihwal yang berkaitan dengan nilai-nilai tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi yang berkembang di Indonesia tidak lepas dari bias negara-negara modern untuk menyusun sistem pemerintahannya, namun dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia selalu mengalami suatu diskursus yang pasang-surut. Dimana para bapak pendiri bangsa juga banyak dipengaruhi oleh arus zaman sehingga memungkinkan mereka untuk berpikir secara terbuka termasuk di dalamnya memilih satu bentuk model pemerintahan yang tepat bagi bangsa Indonesia. Wacana

bertindak sebagai kelompok. Maksudnya adalah bahwa politik sama dengan etika dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya, untuk mencapai eudemoni, kesejahteraan yang sangat penting bagi setiap orang. Jadi di sini sebenarnya politik merupakan upaya mengolah, mengarahkan dan menyelenggarakan kebijakan umum dan keputusan keputusan atau kebijakan yang menyangkut kehidupan bersama.[(Lorens Bagus, **Kamus Filsafat**, Jakarta, (Gramedia: Pustaka Utama, 2005), hal. 903]

⁶ Felix Baghai, *Kewarganegaraan Demokratis*, **Op. Cit.**, hla. 10.

demokrasi kemudian semakin berkembang manakalah terjadi persinggungan antara gagasan modern dan nasionalisme. Bangsa Indonesia sendiri sebenarnya telah melaksanakan praksis demokrasi itu dalam kesehariannya yang begitu melekat kuat.

Bila melihat dari sejarah, dapat dikatakan bahwa demokrasi sendiri bukanlah satu model yang sangat asing bagi rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri sebenarnya telah melaksanakan praksis demokrasi itu dalam kesehariannya. Praksis itu begitu melekat kuat dalam tata kemasyarakatan bangsa ini bahkan telah berkembang menjadi kekayaan bangsa. Praksis demokrasi tersebut misalnya nyata dalam tradisi masyarakat yang berembuk bersama untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau demi memutuskan suatu kegiatan tertentu. Praksis ini sering dikenal sebagai musyawarah-mufakat.

Kekayaan bangsa ini sangat memberikan humus yang bagus bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia, sayangnya ideal demokrasi masih menjadi sebuah diskursus yang diharapkan yakni pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat ternyata belum sampai pada standar yang maksimal. Sentralisasi pembangunan, praktek korupsi oleh pejabat publik, pembangunan yang tidak berorientasi pada masyarakat, bahkan pelanggaran hak-hak kaum minoritas adalah beragam catatan faktual yang dapat menjadi bukti konkrit yang masih tinggal tetap dalam sebuah diskursus yang menunjukkan masih kurang berkembangnya praksis berdemokrasi di negeri ini. Akan tetapi keadaan ini tidak mesti berujung pada pesimisme mutlak mengenai kondisi kronis demokrasi di tanah air, sebaiknya anak-anak bangsa tetap perlu memperjuangkan, menggalakan terus menerus kehidupan demokrasi yang sehat untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya maka dari itu kita belajar berdemokrasi yang benar.

Di antara tokoh-tokoh nasional Indonesia, Franz Magnis-Suseno, bisa dikategorikan sebagai tokoh yang memiliki pemikiran konstruktif filosofis bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia juga termasuk pihak yang turut melaksanakan diskursus praksis demokrasi tersebut dalam keputusan serta tindakanya.

Franz Magnis-Suseno mengakui bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih membutuhkan proses yang panjang, masalahnya terletak pada diskrepansi antara komitmen masyarakat untuk melaksanakan demokrasi dan pemimpin yang tidak berorientasi demokratis. Beliau berujar:

“ kalau sebuah bangsa bertekad membangun kehidupan politik yang demokratis, apa yang harus dituntut? Negara apa yang harus di bangun?⁷Dan sosok demokrasi apa yang sangat dibutuhkan dalam sebuah Negara yang demokratis”

Dalam kaitan dengan ini Franz Magnis-Suseno mencoba merumuskan dengan terinci manakala ciri-ciri negara demokrasi. Akan tetapi *claim* universal demokrasi langsung harus direlatifkan kembali karena beberapa alasan; bahwa tuntutan demokratisasi sendiri mengandaikan tersedianya syarat-syarat politik dan sosial yang memungkinkannya, menuntut lembaga-lembaga untuk mengoperasionalkan kehidupan demokratis. Dan demokrasi beserta ciri-cirinya selalu harus dipahami secara kontekstual dan dinamis. Artinya, bahwa kebebasan demokratis tidak dapat didefenisikan secara operasional di luar konteks masyarakat yang bersangkutan. Dan operasionalisasi unsur-unsur negara demokratis berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Mekanisme-mekanisme demokratis yang sudah optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menjadi penghambat dan *counter productive* apabila

⁷Frans Magnis-Suseno, *Memantapkan Demokrasi Pancasila, sebuah telaah filosofis*; pidato diucapkan pada rapat senat terbuka luar biasa sekolah tinggi filsafat Driyarkara pengukuhan jabatan guru besar tetap filsafat sosial di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1994. hal.11.

tidak dibaharui sesuai dengan kemajuan masyarakat. Sehingga bagaimana menghadapi tuntutan-tuntutan demokratis itu pada tantangan perealisasi demokrasi di Indonesia.

Di sini etika politik menjawab pertanyaan ini secara apriori. Ia tidak mempunyai jalan selain bertolak dari apa yang umumnya oleh mereka yang mengetahui permasalahannya yang dianggap sebagai sebuah demokrasi. Dengan lain kata penelitian filosofis harus bertolak dari konsep demokrasi yang empiris, tepatnya dari konsep ilmu politik.⁸ Berikut ini saya akan sebutkan lima gugus yang menjadi ciri hakiki negara demokratis itu ialah; negara hukum berarti kekuasaan negara terikat pada hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, ada pemilihan berkala yang bebas, menganut prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Kembali pada inti pembahasan mengenai diskursus demokrasi, Franz Magnis-Suseno dalam tulisannya mau mengajuhkan sebuah catatan bahwa diskursus ini bersifat “politis” dalam arti yang seluas-luasnya. Ia melibatkan elite politik dan cendekiawan, ia berakar dalam cita-cita, kekawatiran, harapan, suka-duka pengalaman bangsa Indonesia. Sekaligus diskursus ini selalu berlangsung dalam konteks yang konkret yang sering konflikatif berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kehidupan yang demokratis. Oleh sebab itu jangan heran kalau diskursus demokrasi penuh dengan pelbagai, kerancuan, inkonsistensi dan segala macam tantangan yang dihadapi. Betapa tidak! Demokrasi bukan sebuah masalah yang teoritis saja yang dapat dibahas dengan hati yang tenang. Demokrasi menjadi obyek diskursus bukan masalah teoritis, melainkan memiliki dampak intensif pada segala macam kepentingan bahkan pribadi. Oleh sebab itu siapapun yang terlibat di dalam diskursus demokrasi harus memiliki keyakinan, harapan dan sikap yang keras. Adalah wajar bahwa diskursus itu penuh berbagai pamrih dan rasionalitas.

⁸*Ibid.*

Sadar akan urgensi pemikiran ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengali, mengangkat serta menegaskan penulisan ini di bawah tema: **“Gagasan Demokrasi Franz Magnis-Suseno Dan Implikasinya Demi Perwujudan Negara Indonesia Yang Demokratis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang, maka pokok persoalan terumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan konsep demokrasi Frans Magnis Suseno?
2. Bagaimana sosok demokrasi dan legitimasinya serta format demokrasi di Indonesia?
3. Bagaimana priodisasi diskursus demokrasi di Indonesia dalam pandangan Franz Magnis-Suseno?
4. Bagaimana konsep negara hukum demokratis?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Masyarakat Umum

Karya tulis ini kiranya mampu membuka pemahaman masyarakat luas akan pentingnya memahami konsep demokrasi dalam sistem perpolitikan yang terjadi di Indonesia

1.3.2 Civitas Academica Unika Widya Mandira Kupang & Fakultas Filsafat Agama khususnya

Semoga tulisan ini bisa membantu seluruh mahasiswa dalam memahami realitas politik dan juga menyadari pentingnya suatu sistem demokrasi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan menjadi prioritas dalam kehidupan masyarakat yang adil.

1.3.3 Diri Sendiri

Agar penulis sendiri boleh menjadi profesional dalam bidang studi yang penulis geluti. Terlebihnya, penulis bisa memahami konsep demokrasi dengan detail agar bisa mampu menilai suatu sistem pemerintahan yang baik secara demokratis.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menguraikan pemikiran Franz Magnis-Suseno, penulis menggunakan metode kepustakaan. Sedapat mungkin penulis dengan selektif dan representatif berjuang memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan topik tulisan ini baik secara langsung maupun tak langsung. Dari literatur-literatur itu, penulis berusaha mengumpulkan kemudian mengkaji pemikiran Franz Magnis-Suseno dan pemikiran teoritis lain tetangnya, dengan bahasa dan pemahaman penulis sendiri.

1.5 Sistematika Penulisan

pembahasan skripsi ini mencakup lima bab. Bab pertama, pendahuluan, yang di dalamnya digambarkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kontribusi penulisan, metode penulisan. Bab dua, selang pandang mengenai biografi Franz Magnis-Suseno. Bab tiga, penulis memaparkan gambaran umum tentang demokrasi. Bab empat, penulis memaparkan judul sebagai bab inti. Gagasan demokrasi Franz Magnis-Suseno dan implikasinya demi perwujudan negara Indonesia yang demokratis. Bab lima sebagai penutup diuraikan tentang kesimpulan, catatan kritis dan saran.